



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 23 Maret 2021/Periodik - 2020)

BIDANG : YUDIKATIF
LEMBAGA : MAHKAMAH KONSTITUSI
UNIT KERJA : SEKRETARIAT JENDERAL

I. DATA PRIBADI

1. Nama : MUHAMMAD GUNTUR HAMZAH
2. Jabatan : SEKRETARIS JENDERAL
3. NHK : 156383

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 2.288.352.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 320 m²/120 m² di KOTA MAKASSAR, HASIL SENDIRI Rp. 295.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 135 m²/148 m² di KOTA MAKASSAR, HASIL SENDIRI Rp. 1.993.352.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 476.250.000

1. MOBIL, MITSUBISHI PAJERO SPORT JEEP Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 390.000.000
2. MOTOR, PIAGGIO LX 150 SEPEDA MOTOR Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 29.500.000
3. MOTOR, SUZUKI EN 125 A Tahun 2005, HASIL SENDIRI Rp. 2.750.000
4. LAINNYA, SEPEDA MEREK HUMO C20 Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 9.000.000
5. LAINNYA, SEPEDA MEREK BROMPTON B19 Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 35.000.000
6. LAINNYA, SEPEDA LIPAT --- Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 165.250.000

D. SURAT BERHARGA Rp. 2.500.000.000

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 2.326.685.126

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 7.756.537.126



III. HUTANG

Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 7.756.537.126

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.